



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

10. Peraturan. . .

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
16. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1614);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
3. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKPD Kota Batam Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah otonom untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II. . .

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2026, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2025.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
 - c. BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - d. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 - e. BAB IV PENUTUP

Pasal 3

Penjabaran Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan menjadi Lampiran I sampai dengan Lampiran XLV dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi:

- a. acuan penyusunan RKA-Perangkat Daerah;
- b. landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah disusun berlandaskan RKPD.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 18 SEPTEMBER 2025

WALI KOTA BATAM,



AMSAKAR ACHAMAD

Diundangkan di Batam
pada tanggal 18 SEPTEMBER 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

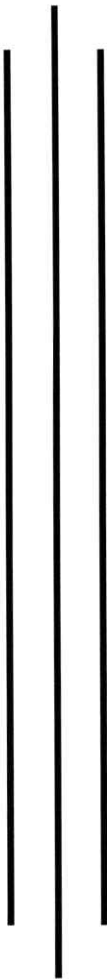


FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2025 NOMOR 1621

LAMPIRAN XXVI : PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 51 TAHUN 2025
TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS
KOPERASI DAN USAHA MIKRO TAHUN 2026





Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Pemerintah Kota Batam

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026



**DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA BATAM
TAHUN ANGGARAN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2026.

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja (Renja) memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ini dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh jajaran pejabat dan staf di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang perencanaan dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2026

Semoga Rencana Kerja (Renja) ini dapat dipedomani oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat guna menyukseskan visi dan misi Pemerintah Kota Batam.

Batam, September 2025

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kota Batam



Salim, S.Sos., M.Si

NIP. 19681021 199010 1 001

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang.....	1
1.1.1	Pengertian Renja Perangkat Daerah	1
1.1.2	Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah	1
1.1.3	Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	2
1.2	Landasan Hukum	3
1.3	Maksud dan Tujuan.....	4
1.4	Sistematika Penulisan.....	4
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	1
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	1
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	8
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	18
2.3.1	Tingkat Kinerja Perangkat Daerah	18
2.3.2	Permasalahan dan Hambatan.....	18
2.3.3	Tantangan dan Peluang	19
2.3.4	Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	20
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	29
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	29
3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	29
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	29
3.3	Program dan Kegiatan.....	30
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	35
BAB V	PENUTUP	55
5.1	Catatan Penting	55
5.2	Kaidah-kaidah Pelaksanaan.....	56
5.3	Rencana Tindak Lanjut	56

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah.....8

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam8

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kota Batam20

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kota Batam.....29

Tabel 3.1 Target Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2026.....30

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiran Maju Tahun 2027 Kota Batam35

Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 202635

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Renja1

Gambar 1.2 Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya2

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, sehingga dengan Undang-undang ini kita mengenal satu bagian penting dari perencanaan daerah yaitu rencana pembangunan daerah.

1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah

Rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD dan RKPD sedangkan Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rancangan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2025-2029 yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2025-2029. Renja menjadi jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Di dalam Renja berisikan juga evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang urusan perencanaan, strategi, program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Renja disusun dengan tahapan sebagaimana tergambar pada alur sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan Renja
- b. Penyusunan Rancangan Awal Renja
- c. Penyusunan Rancangan Renja
- d. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah
- e. Perumusan Rancangan Akhir Renja
- f. Penetapan Renja.

Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Renja

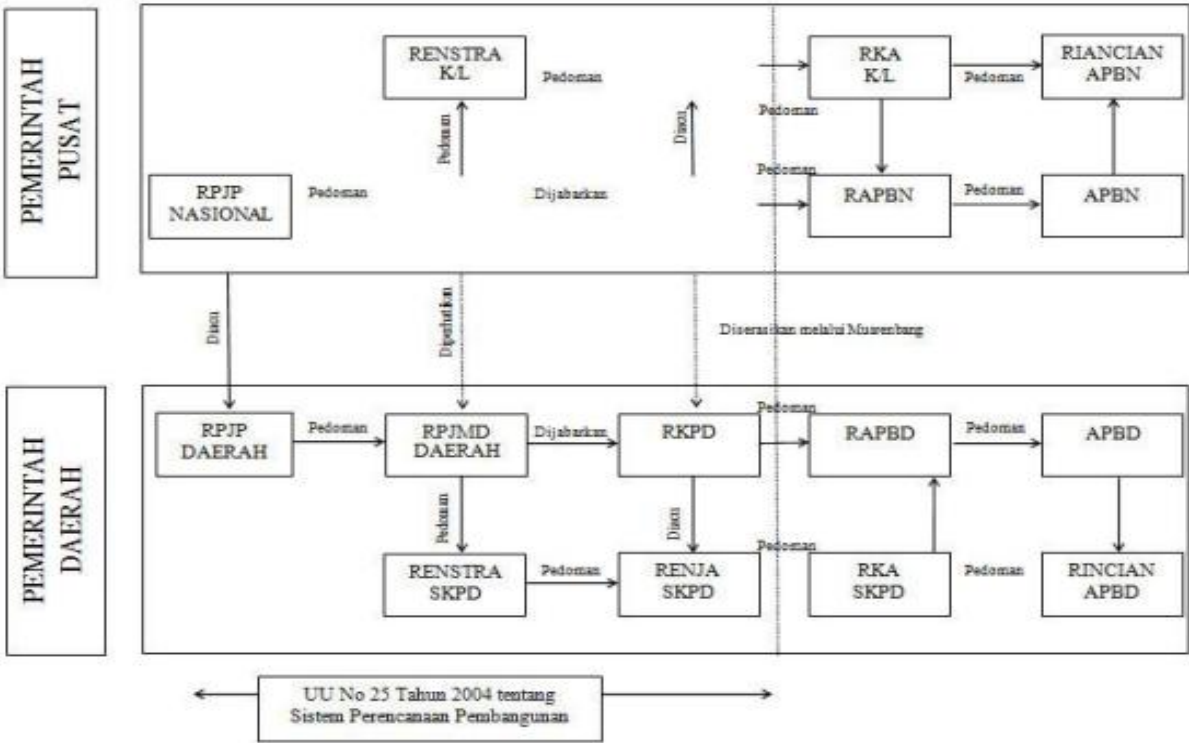


1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Renja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan harus disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan daerah. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam menyusun RKA sebelum ditetapkan menjadi APBD.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 1.2 Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 130);
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 136);
9. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 206 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1546);

10. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1614).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan 2026 dan memberi gambaran perencanaan program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sesuai tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun Anggaran 2026.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam ini adalah untuk mensinergikan program dan kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD) 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang penulisan (1.1), dasar hukum (1.2), maksud dan tujuan (1.3), dan sistematika penulisan (1.4).

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu (2.1), analisis kinerja pelayanan perangkat daerah (2.2), isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah (2.3), review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) (2.4) dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat (2.5).

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional (3.1). tujuan dan sasaran Renja perangkat daerah (3.2), program dan kegiatan (3.3) yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target sasaran kinerja Rencana Strategis (Renstra) untuk Tahun (n) yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah Tahun (n).

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Memuat rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah Tahun (n).

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan, catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi terhadap Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan dan hasil rencana program dan kegiatan.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan tahun 2024 sebagaimana Tabel 2.1 dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota urusan perencanaan, dari target 100%, hingga bulan Desember 2024 tercapai 100%.
 - b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah hingga bulan November 2024 tercapai:
 - 1) Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu, dari target 100%, tercapai 100%
 - 2) Persentase Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu, dari target 100%, tercapai 100%
 - 3) Persentase Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu, dari target 100%, tercapai 100%
2. Realisasi program/kegiatan yang telah melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:
 - a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah urusan perencanaan, dari target 98% hingga bulan November 2024 tercapai 100%
3. Faktor-faktor pendukung terpenuhinya/melebihi target kinerja program/kegiatan adalah sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan terlaksana sesuai rencana;
 - b. meningkatnya pelaksanaan pengendalian dan monitoring perencanaan pembangunan;
 - c. koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal cukup baik; dan
 - d. dukungan ketersediaan sarana prasarana yang cukup baik.
4. Implikasi terhadap tercapainya target capaian program Diskum Tahun 2024 adalah mendukung pada pencapaian target sasaran Renstra Diskum.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam sampai dengan tahun 2024 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2025 Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (2025)	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (=7/6)	9	10 (=5+7+9)	11 (=10/4)
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	100	100	100	100	100	100	100	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	3	1	1	100	1	5	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100	100	100	100	100	100	300	300
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55	49	55	55	100	60	164	298,18

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (2025)	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (=7/6)	9	10 (=5+7+9)	11 (=10/4)
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100	0	100	100	100	100	200	200
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		5					5		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	2	1	1	100	2	2	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48	48	45	45	100	45	45	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	2	1	1	100	1	4	80
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	12	12	100	12	6	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang	100	100	100	100	100	100	100	100

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (=7/6)	9	10 (=5+7+9)	11 (=10/4)
		terpenuhi								
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	4	2	2	100	2	8	80
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100	100	100	100	100	100	100	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	24	12	12	100	12	48	80
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	24	12	12	100	12	48	80
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100	100	100	100	100	100	100	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	1	1	100	1	1	100

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (=7/6)	9	10 (=5+7+9)	11 (=10/4)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	1	1	1	100	1	3	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	210	84	41	41	100	41	166	79,05
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	“PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA”								
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	98	92,12	100	100	100	100	100	79,71
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	100	100	100	100	100	100	100	100
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		50	25	45	45	100	45	70	100

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (=7/6)	9	10 (=5+7+9)	11 (=10/4)
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	160	165	170	170	100	175	495	100
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		160	165	170	170	100	175	495	100
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	160	165	170	170	100	175	495	100
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		1027	406	200	200	100	208	814	79,26
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		0	200	210	210	100%	230	520	100%
	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok									

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (2025)	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (=7/6)	9	10 (=5+7+9)	11 (=10/4)
	Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi									
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	15	6	3	3	100,00	3	12	80
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Persentase Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Persentase Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang menyelesaikan Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan dan	100	100	100	100	100	100	100	100

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat) Daerah Tahun (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (=7/6)	9	10 (=5+7+9)	11 (=10/4)
		tepat waktu								
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		100	100	100	100	100	100	100	100
	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil		15	15	15	15	100	15	15	100
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan)		315	126	63	63	100,0	63	252	80,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	2	1	1	100	1	4	80
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	730	495	500	500	100,0	300	10495	100

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (2025)	Perkiraaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (=7/6)	9	10 (=5+7+9)	11 (=10/4)
	Pengembangan Usaha Mikro		650	495	500	500	100	300	10495	100
	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro)		40			40	100	30	40	100
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi		40			40	100,0	40	40	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berisikan capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2026 adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
				(tahun n-2)	(tahun n-1)	(tahun n)	(tahun n+1)	(tahun n-2)	(tahun n-1)	(tahun n)	(tahun n+1)	
1.	Pertumbuhan Usaha Mikro	-	-	N/A	58,59	63,74	26	60,02	63,84	100%	100%	
2.	Pertumbuhan Omset Koperasi	-	-	23	24	25	66,32	23,73	24,43	100%	100%	
3.	Pertumbuhan Kawasan/Klaster Kreatif Daerah	-	-	80.07	82,07	84.07		N/A	82,09	84.09	95,82	
4.	Indeks layanan Kesekretariatan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perencanaan serta tugas lain yang diberikan Wali Kota.

Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perencanaan pembangunan daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
- d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan

Di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya **Dinas Koperasi dan Usaha Mikro** Kota Batam, tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja maupun kinerja pelayanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan-permasalahan tersebut, dapat dikategorikan dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

A. Permasalahan Internal

1. Perlunya peningkatan kapasitas SDM perencana;
2. Perlunya peningkatan kualitas aplikasi pengukuran kinerja;
3. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan pengendalian capaian kinerja perencanaan;
4. Belum optimalnya pengelolaan data perencanaan pembangunan;
5. Perlu optimalnya peningkatan sarana prasarana perkantoran, khususnya yang terkait dengan kapasitas ruang rapat.

B. Permasalahan Eksternal

1. Perlunya peningkatan SDM perencana di perangkat daerah;
2. Perlunya peningkatan komitmen pimpinan perangkat daerah dalam mencapai target kinerja.

Analisis terhadap lingkungan internal Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memperlihatkan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

a. Kekuatan (*Strength*)

1. Telah tersedianya pedoman penyusunan dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah;
2. Ada dasar hukum yang jelas yang mengatur kewenangan, tugas pokok dan fungsi Diskum;
3. Tersedianya SDM aparatur yang profesional (85,49% lulusan perguruan tinggi)
4. Adanya kewenangan untuk menyusun rencana pembangunan daerah dengan dukungan para pemangku kepentingan;
5. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang untuk

- jangka Panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD) dan tahunan (RKPD);
6. Tersedianya data-data statistik (BPS);
 7. Musyawarah perencanaan pembangunan di daerah telah berjalan dengan baik, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan dan kota;
 8. Sarana dan prasarana perkantoran yang cukup memadai.
- b. Kelemahan (*weaknesses*)**
1. Belum selarasnya antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan perangkat daerah;
 2. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan.

2.3.3 Tantangan dan Peluang

Untuk pengembangan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam terdapat beberapa **tantangan** yang harus dihadapi yaitu:

- a. Masih ditemukan inkonsistensi penggunaan indikator kinerja program dan kegiatan serta target tahunan sehingga kesinambungan pencapaian kinerja tidak terlihat;
- b. Munculnya beberapa perubahan kebijakan nasional yang mendadak dan berdampak pada kebijakan daerah sehingga menyebabkan timbulnya inkonsistensi perencanaan pembangunan daerah;
- c. Belum optimalnya kompetensi perencana di tingkat perangkat daerah untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas;
- d. Koordinasi antar perangkat daerah, pemerintah provinsi dan nasional belum optimal untuk menghasilkan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah;

Di samping tantangan yang dihadapi terdapat pula beberapa **peluang** yang dapat mengembangkan pelayanan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam yaitu:

- a. Adanya dukungan pemerintah pusat dan provinsi dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk kebijakan untuk mengintegrasikan sistem perencanaan pembangunan di daerah;
- b. Adanya musrenbang di tingkat kota, provinsi dan nasional yang dapat dimanfaatkan untuk mensinergikan perencanaan daerah;
- c. Partisipasi masyarakat dalam menyusun rencana pembangunan daerah yang cukup tinggi, termasuk dari LSM, Perguruan Tinggi dan dunia usaha;
- d. Tersedianya system informasi manajemen berbasis teknologi untuk mendukung perencanaan pembangunan.

2.3.4 Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis kritis, maka dapat diidentifikasi isu-isu strategis yang sedang dihadapi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam antara lain:

1. Perencanaan pembangunan belum seluruhnya terascading dengan baik;
2. Belum optimalnya pemanfaatan hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan;
3. Konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah;
4. Kompetensi SDM perencana

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan kerangka dan langkah awal dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah menjadi kewajiban apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki. maka dilakukanlah seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran berkaitan dengan arah kebijakan RKPD.

Review terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan rumusan kebutuhan program dan kegiatan tahun 2026 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

NO.		RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	CATATAN PENTING
		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO				16.019.227.741,36					20.644.271.106,00	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Batam	Persentase Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	13.461.587.771	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Kota Batam	Persentase keselarasan indikator program prioritas RPJMD dengan RKPD	100%	1.674.480.400	
1.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	10.399.283.183	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	1.114.386.400	
	1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/Bulan	10.332.083.183	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/Bulan	86.508.800	
	2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 BA	67.200.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Batam	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 BA	772.043.600	
2.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	85.000.630	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	255.834.000	
	1.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Batam	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7 Orang	85.000.630	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Batam	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7 Orang	512.725.000	
3.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	546.033.863	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	245.723.000	
	1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	2 Paket	7.160.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	2 Paket	7.160.000	

NO.		RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	CATATAN PENTING
				Disediakan					Disediakan			
	2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	83.923.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	83.923.000	
	3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	41.108.863	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Batam	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	41.108.863	
	4.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Batam			14.584.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Batam			14.584.000	
	5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam			399.258.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam			399.258.000	
4.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Batam	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%	200.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Batam	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%	200.000.000	
	1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	200.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	200.000.000	
5.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	352.164.715	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	352.164.715	
	1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	347.164.715	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	347.164.715	
	2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam			5.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Batam			5.000.000	
5.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100%	759.105.380	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	100%	759.105.380	

NO.		RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	CATATAN PENTING
	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Batam	Persentase Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Operasionaln	2 Unit	44.140.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Batam	Persentase Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Operasionaln	2 Unit	44.140.000	
	2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam	Persentase Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit	271.750.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Batam	Persentase Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit	271.750.000	
	3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48 Unit	65.610.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48 Unit	65.610.000	
	4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Batam	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	377.605.380	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Batam	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	377.605.380	
6.		Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Batam	Persentase Terpenuhinya Layanan BLUD	1 Unit Kerja	1.120.000.000	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Batam	Persentase Terpenuhinya Layanan BLUD	1 Unit Kerja	1.120.000.000	
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Kota Batam	Persentase Koperasi yang Sehat	91,67%	335.803.330	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Kota Batam	Persentase Koperasi yang Sehat	91,67%	88.363.600	
1.		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase koperasi yang aktif dan dinilai kesehatannya	60,50 Unit Usaha	335.803.330	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Persentase koperasi yang aktif dan dinilai kesehatannya	60,50 Unit Usaha	10.145.000	
	1.	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam			335.803.330 0	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Batam			0	
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Kota Batam	Persentase koperasi yang dilatih SDM-nya	30,91%	300.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	Kota Batam	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	1 lap	1.232.600	

NO.		RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	CATATAN PENTING
							Daerah bidang Pemerintahan		Perangkat Daerah bidang Pemerintahan			
1		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	53,85%	300.000.000	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	53,85%	13.200.000	
	1.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kota Batam	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	175 Orang	300.000.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kota Batam	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	175 Orang		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kota Batam	Persentase usaha mikro yang dibina dan aktif	65,57%	729.911.492	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kota Batam	Persentase usaha mikro yang dibina dan aktif	65,57%	63.786.000	
1.		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kota Batam	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi Sertifikasi, sosialisasi, Pelatihan dan Kemitraan	1219 Unit Usaha	729.911.492	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kota Batam	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi Sertifikasi, sosialisasi, Pelatihan dan Kemitraan	1219 Unit Usaha	96.966.400	
	1.	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kota Batam	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	200 Unit Usaha	229.911.492	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kota Batam	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	200 Unit Usaha	70.075.600	
	2.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kota Batam	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi		150.000.000	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kota Batam	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi		150.000.000	
	3.	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Kota Batam	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	150 Unit Usaha	150.000.000	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Kota Batam	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	150 Unit Usaha	150.000.000	

NO.		RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	CATATAN PENTING
	4.	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik)	Kota Batam	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi Promosi	2 Unit Usaha	100.000.000	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik)	Kota Batam	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi Promosi	2 Unit Usaha	100.000.000	
	5.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Kota Batam	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pelatihan	100 Unit Usaha	100.000.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Kota Batam	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pelatihan	100 Unit Usaha	100.000.000	
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Kota Batam	Persentase usaha mikro Ekonomi Kreatif	53,79%	1.191.925.148	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Kota Batam	Persentase usaha mikro Ekonomi Kreatif	53,79%	5.895.400	
1.		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kota Batam	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi	1000 Unit Usaha	1.191.925.148	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kota Batam	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi	1000 Unit Usaha	164.932.000	
	1.	Pengembangan Usaha Mikro	Kota Batam	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	250 Unit Usaha	941.925.148	Pengembangan Usaha Mikro	Kota Batam	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	250 Unit Usaha	14.960.000	
	2.	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Kota Batam	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi Inkubasi	30 Unit Usaha	150.000.000	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Kota Batam	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi Inkubasi	30 Unit Usaha		
	3.	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Kota Batam	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	70 Unit Usaha	100.000.000	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Kota Batam	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	70 Unit Usaha	68.888.500	
		UPTD PUSAT PELAYANAN USAHA TERPADU (PLUT)	Kota Batam			761.054.377	UPTD PUSAT PELAYANAN USAHA TERPADU (PLUT)	Kota Batam			761.054.377	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA	Kota Batam	Persentase usaha mikro yang dibina dan aktif	65,57%	761.054.377	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA	Kota Batam	Persentase usaha mikro yang dibina dan aktif	65,57%	761.054.377	

NO.		RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
		PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	CATATAN PENTING
		MIKRO (UMKM)					MIKRO (UMKM)					
1.		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kota Batam	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi Sertifikasi,sosialisasi, Pelatihan dan Kemitraan	1219 Unit Usaha	761.054.377	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kota Batam	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi Sertifikasi,sosialisasi, Pelatihan dan Kemitraan	1219 Unit Usaha	761.054.377	
	1.	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kota Batam	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	300 Unit Usaha	761.054.377	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kota Batam	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	300 Unit Usaha	761.054.377	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam membuka akses yang luas kepada pemangku kepentingan dalam memberikan usulan pembangunan di daerahnya. Usulan rencana pembangunan dapat berasal *bottom up* yaitu usulan dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Tingkat Kota Batam hingga Tingkat Provinsi. Selain itu usulan rencana pembangunan juga berasal dari usulan *top down* dari kunjungan kerja Wali Kota dan Reses DPRD.

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan oleh pemangku kepentingan berdasarkan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Batam yang mana penjaringan kebutuhan masyarakat dilakukan melalui SIPD yang diajukan kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Usulan kegiatan masyarakat selanjutnya akan diverifikasi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam berdasarkan syarat teknis yang telah ditentukan. Selanjutnya akan ditentukan usulan prioritas yang dapat diakomodir oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan serta anggaran. Adapun tabel hasil kajian usulan program dan kegiatan masyarakat tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1.	Pelatihan Komunikasi Bisnis Bagi Pelaku Usaha Mikro	SAGULUNG, Kota Batam	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	100	
2.	Bimtek Perizinan bagi Pelaku Usaha Mikro Pemula	kecamatan Sagulung, Kota Batam	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	100	
3.	Pelatihan Inovatif Membuat Kerajinan dan Barang Tak Terpakai	Perumahan Marbella RW 039 Kecamatan Batam Kota Kelurahan Belian, Kota Batam	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	30	
4.	Pelatihan Pemasaran Digital	Kantor Camat Bengkong, Kota Batam	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	100	
5.	Pelatihan Inovasi dan Pengembangan Produk	Kantor Camat Bengkong, Kota Batam	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	100	
6.	Pelatihan Peningkatan Pemahaman SDM	Kecamatan Sei Beduk,	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	100	

	Koperasi Bagi Masyarakat Melalui Sosialisasi Perkoperasian	Kota Batam			
7.	Bimtek Perizinan bagi Pelaku Usaha Mikro Pemula	Se - kec. Sei beduk, Kota Batam	Jumlah Usaha Mikro yang Terasilitasi	50	
8.	Pelatihan Inovatif Membuat Kerajinan dan Barang Tak Terpakai	PERUM PURIAGUNG 4 RW21 KEL,MANGSANG-KEC.SEIBEDUK, Kota Batam	Jumlah Usaha Mikro yang Terasilitasi	5	
9.	Pelatihan Inovatif Membuat Kerajinan dan Barang Tak Terpakai	KECAMATAN SAGULUNG , Kota Batam	Jumlah Usaha Mikro yang Terasilitasi	50	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 menggariskan Visi Indonesia tahun 2045 yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2026 berada pada tahap jangka menengah yang ke-1 yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dengan visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026.

Memperhatikan arah kebijakan nasional dan provinsi Tahun 2026, Renja Diskum Kota Batam Tahun 2026 tidak mendukung secara langsung prioritas-prioritas pembangunan nasional maupun provinsi. Namun, sesuai tugas pokok dan fungsi Diskum yaitu mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, maka dukungan Diskum dalam pencapaian arah kebijakan nasional dan provinsi Tahun 2026 adalah melakukan sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi perencanaan pembangunan Pusat dan Daerah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah yang memuat rancangan kerangka ekonomi, rencana kerja dan pendanaan, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 masih mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 sebagai instansi induk sebelum terbitnya Perda No. 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Adapun tujuan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah ***“Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian kinerja pembangunan daerah”***.

Sedangkan sasaran dalam mencapai tujuan tersebut mengacu pada Renstra Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya Perencanaan yang Partisipatif, Selaras, dan Transparan;
- b. Meningkatnya Kualitas perencanaan dan Pengendalian Kinerja Perangkat Daerah;
- c. Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut, target tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2026 mengacu pada Rancangan Renstra perangkat daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.1 Target Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2026

No.	Tujuan/Sasaran PD	Indikator Tujuan/Sasaran PD	Target Tahun 2026
1.	Meningkatnya peran koperasi dan usaha mikro dalam perekonomian daerah	1. Pertumbuhan Omset Koperasi	24%
		2. Pertumbuhan Omset Usaha Mikro	63,74%
2.	Meningkatnya Ekonomi Kreatif Daerah	Pertumbuhan pelaku usaha mikro ekonomi kreatif	28,23%
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	100%

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam merumuskan program dan kegiatan tahun 2026 mengacu pada pencapaian visi misi Kepala Daerah yang termuat dalam RPJMD Kota Batam 2021-2026 yang dirinci dalam Renstra Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026. Perumusan program dan kegiatan ini dalam rangka mendukung pencapaian Misi ke-5 Kota Batam Tahun 2021-2026 dalam dokumen RPJMD tersebut telah dijabarkan indikator dan target capaian tiap tahun yang harus dicapai dengan program dan kegiatan tertentu.

Tahun 2026 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mengusulkan 3 (tiga) program, 13 (tiga belas) kegiatan, 37 (tiga puluh tujuh) subkegiatan, dengan kebutuhan dana sebesar Rp20.644.271.106,00 (Dua Puluh Milyar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Enam Rupiah). Adapun program, kegiatan dan subkegiatan yang diusulkan adalah sebagai berikut:

1. **PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**
 - 1.1 **Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**
 - 1.1.1 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
 - 1.1.2 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
 - 1.1.3 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.2 **Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**
 - 1.2.1 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan PD
 - 1.2.2 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 1.3 **Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**

- 1.3.1 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
- 2. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**
 - 2.1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**
 - 2.1.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 2.1.2 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah bidang Pemerintahan
 - 2.1.3 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 2.1.4 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah bidang Pembangunan Manusia
 - 2.2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**
 - 2.2.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 2.2.2 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah bidang Perekonomian
 - 2.2.3 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 2.2.4 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
 - 2.3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**
 - 2.3.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 2.3.2 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah bidang Infrastruktur
 - 2.3.3 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - 2.3.4 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah bidang Kewilayahan
- 3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
 - 3.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - 3.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 3.1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 3.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - 3.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 3.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 3.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - 3.3.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 3.3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 3.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - 3.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- 3.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3.4.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 3.4.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 3.4.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 3.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - 3.5.1 Pengadaan Mebel
 - 3.5.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3.5.3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 3.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - 3.6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - 3.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 3.7.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3.7.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3.7.4 Pemeliharaan /Rehabilitas gedung Kantor dan Bangunan lainnya

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiran Maju Tahun 2027 Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kode Rekening	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Renstra)
						21.038.399.580,64				33.041.468.104
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase keselarasan indikator program prioritas RPJMD dengan RKPD	Kota Batam	84,46%	12.108.207.680,64	PAD		100%	18.536.438.778
1.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	Kota Batam	100%	17.746.800	PAD		100%	30.900.000
	1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Batam	6 Dokumen	1.906.800	PAD			5.000.000
	2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Batam	4 Laporan	15.840.000	PAD			25.900.000
2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	Kota Batam	100%	9.269.938.500,64	PAD		100%	13.509.283.183
	1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	56 orang/bulan	9.225.048.500,64	PAD			13.509.283.183
	2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Batam	12 Dokumen	44.890.000	PAD			77.200.000
3.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Kota Batam	100%	83.027.000	PAD			0,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp)	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Renstra)
	1.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Batam	7 Orang	83.027.000	PAD			0,00
4.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam	100%	356.313.800				616.925.000
	1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Batam	2 Paket	11.159.800				8.160.000
	2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Batam	2 Paket	135.272.000				93.923.000
	3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Batam	2 Paket	22.780.000				15.584.000
	4.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	12 Laporan	187.102.000				499.258.000
5.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Kota Batam	100%	707.871.200				1.853.885.500
	1.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Batam	63 Unit	344.053.100				386.381.000
	2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Kota Batam	21 Unit	363.818.100				1.467.504.500
6.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Kota Batam	100%	195.825.000				357.164.715

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
	1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Batam	12 Laporan	195.825.000			357.164.715
7.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	Kota Batam	100%	677.485.380			936.280.380
	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Batam	1 Unit	40.380.000			74.140.000
	2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Batam	8 Unit	193.890.000			298.925.000
	3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Batam	36 Unit	65.610.000			85.610.000
	4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Batam	2 Unit	377.605.380			477.605.380
8.		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Terpenuhinya Layanan BLUD	Kota Batam	1 Unit Kerja	800.000.000	PAD		1.232.000.000
	1.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Batam	1 Unit Kerja	800.000.000	PAD		1.232.000.000
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi aktif	Kota Batam	36,99%	83.695.400	PAD		52.765.000
1.		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah	Jumlah Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah	Kota Batam	357 Unit Usaha	83.695.400	PAD		52.765.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp)	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
		Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota							
	1.	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Kota Batam	50 Unit Usaha	83.695.400	PAD			52.765.000
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Kota Batam	42,30%	317.116.000	PAD			1.368.982.523
1.		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Kota Batam	50 Unit Usaha	317.116.000	PAD			1.368.982.523
	1.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Kota Batam	130 Unit Usaha	171.310.800	PAD			1.368.982.523
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase meningkatnya koperasi yang melaksanakan RAT	Kota Batam	30,78%	171.310.800	PAD			0,00
1.		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit usaha dan kelompok masyarakat yang mendapat Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Batam	1 laporan	5.895.400	PAD			0,00
	1.	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kota Batam	1 Kelompok Masyarakat	125.380.700	PAD			0,00
	2.	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Kota Batam	1 Uit Usaha	29.885.500	PAD			0,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp)	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
	3.	Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	Kota Batam	1 Uit Usaha	16.044.600	PAD			0,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitasi pemberdayaan usaha	Kota Batam	79,52%	2.819.260.200	PAD			3.780.164.140
1.		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi Sertifikasi, sosialisasi, Pelatihan dan Kemitraan	Kota Batam	750 Unit Usaha	2.819.260.200	PAD			3.780.164.140
	1.	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Kota Batam	300 Unit Usaha	1.192.790.000	PAD			865.617.890
	2	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Kota Batam	400 Unit Usaha	1.387.328.000	PAD			1.100.000.000
	3.	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Kota Batam	200 Unit Usaha	150.000.000	PAD			642.372.500
	4.	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Batam	2 Unit Usaha	25.795.400	PAD			1.062.173.750
	5.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Kota Batam	317 Orang	63.346.800	PAD			110.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp)	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Renstra)
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro Ekonomi Kreatif	Kota Batam	58,07%	5.538.809.500	PAD				9.303.117.662
1.	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi	Kota Batam	1825 Unit Usaha	5.538.809.500	PAD				9.303.117.662
	1. Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Kota Batam	580 Unit Usaha	485.610.100	PAD				5.436.117.662
	2. Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah yang Difasilitasi	Kota Batam	1500 Orang	4.000.000.000	PAD				3.000.000.000
	3. Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Kota Batam	20 Unit Usaha	174.641.400	PAD				350.000.000
	4. Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Kota Batam	400 Unit Usaha	878.558.000	PAD				517.000.000
	UPTD PUSAT PELAYANAN USAHA TERPADU (PLUT)									
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Kota Batam		803.580.340	PAD				1.466.359.814,70
1.	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Kota Batam	4 paket	803.580.340	PAD				1.466.359.814,70
	1. Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha	Kota Batam	300 Unit Usaha	803.580.340	PAD				1.466.359.814,70

Kode Rekening		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2026					Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Renstra)
			Mikro							

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam tahun 2026 merupakan tahun ke-2 perodesasi Renstra Tahun 2025-2029. Adapun dokumen Rencana Kerja tahun 2026 adalah dalam rangka operasionalisasi Renstra Diskum untuk mendukung tugas dan fungsi serta merealisasikan visi dan misi Kepala Daerah. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam untuk tahun 2026 melaksanakan 3 (tiga) program, 13 (tiga belas) kegiatan dengan 37 (tiga puluh tujuh) subkegiatan beserta usulan pendanaan pagu indikatif tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2026				
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp)	Sumber Dana
	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO				21.038.399.580,64	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP PD Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	Kota Batam	100%	12.108.207.680,64	PAD
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	Kota Batam	100%	17.746.800,00	PAD
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Batam	6 Dokumen	1.906.800,00	PAD
	2. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Batam	4 Laporan	15.840.000,00	PAD
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Analisis data dan informasi yang dimanfaatkan	Kota Batam	100%	9.269.938.500,64	PAD
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	56 orang/bulan	9.225.048.500,64	PAD
	2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Batam	12 Dokumen	44.890.000,00	PAD
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Kota Batam	100%	83.027.000,00	PAD

Kode Rekening		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2026				
			Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp)	Sumber Dana
	1.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Batam	7 Orang	83.027.000,00	PAD
4.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam	100%	356.313.800,00	PAD
	1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Batam	2 Paket	11.159.800,00	PAD
	2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Batam	2 Paket	135.272.000,00	PAD
	3.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Batam	12 dok	13.200.000	PAD
	4.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	12 Laporan	187.102.000,00	PAD
5.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Kota Batam	100%	707.871.200,00	PAD

Kode Rekening		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2026				
			Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp)	Sumber Dana
	1.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Batam	63 Unit	344.053.100,00	PAD
	2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Batam	21 Unit	363.818.100,00	PAD
6.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Kota Batam	100%	195.825.000,00	PAD
	1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Batam	12 laporan	195.825.000,00	PAD
7.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi	Kota Batam	100%	677.485.380,00	PAD
	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Batam	1 Unit	40.380.000,00	PAD
	2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Batam	8 Unit	193.890.000,00	PAD
	3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (RKPD)	Kota Batam	36 Unit	65.610.000,00	PAD

Kode Rekening		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2026				
			Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp)	Sumber Dana
	4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Batam	2 Unit	377.605.380,00	PAD
8.		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Terpenuhinya Layanan BLUD	Kota Batam	1 Unit	800.000.000,00	PAD
	1.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Batam	1 Unit	800.000.000,00	PAD
	20.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Batam	3 Laporan	81.196.000	PAD
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi aktif	Kota Batam	36,99 %	15.394.519.506	PAD
1		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Batam	357 Unit Usaha	83.695.400,00	PAD
	1.	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Kota Batam	50 Unit Usaha	83.695.400,00	PAD
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Kota Batam	42,30 %	317.116.000,00	PAD

Kode Rekening		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2026				
			Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp)	Sumber Dana
1.		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Kota Batam	50 Unit Usaha	317.116.000,00	PAD
	1.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Kota Batam	175 Orang	317.116.000,00	PAD
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase meningkatnya koperasi yang melaksanakan RAT	Kota Batam	30.78 %	171.310.800,00	PAD
1.		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kota Batam	130 Unit Usaha	171.310.800,00	PAD
	1.	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Batam	1 Kelompok Masyarakat	125.380.700,00	PAD
	2.	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Kota Batam	1 Unit Usaha	29.885.500,00	PAD
	3.	Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	Kota Batam	1 Unit Usaha	16.044.600,00	PAD
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitasi pemberdayaan usaha	Kota Batam	79,52 %	2.819.260.200,00	PAD

Kode Rekening		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2026				
			Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp)	Sumber Dana
1.		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi Sertifikasi, sosialisasi, Pelatihan dan Kemitraan	Kota Batam	750 Unit Usaha	2.819.260.200,00	PAD
	1.	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Kota Batam	300 Unit Usaha	1.192.790.000,00	PAD
	2.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Kota Batam	400 Unit Usaha	1.387.328.000,00	PAD
	3.	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kota Batam	200 Unit Usaha	150.000.000,00	PAD
	4.	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Kota Batam	2 Unit Usaha	25.795.400,00	PAD
	5.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Kota Batam	317 Orang	63.346.800,00	PAD

Kode Rekening		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2026				
			Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp)	Sumber Dana
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro Ekonomi Kreatif	Kota Batam	58,07 %	5.538.809.500,00	PAD
1.		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi	Kota Batam	1825 Unit Usaha	5.538.809.500,00	PAD
	1.	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Kota Batam	580 Unit Usaha	485.610.100,00	PAD
	2.	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah yang Difasilitasi	Kota Batam	1500 Orang	4.000.000.000,00	PAD
	3.	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Kota Batam	20 Unit Usaha	174.641.400,00	PAD
	4.	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Kota Batam	400 Unit Usaha	878.558.000,00	
		UPTD PUSAT PELAYANAN USAHA TERPADU (PLUT)				803.580.340,00	PAD
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang dibina dan aktif	Kota Batam	65,57 %	803.580.340,00	PAD
1.		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi Sertifikasi, sosialisasi, Pelatihan dan Kemitraan	Kota Batam	1219 Unit Usaha	803.580.340,00	PAD

Kode Rekening		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rencana Tahun 2026				
			Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp)	Sumber Dana
		Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan					
	1.	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Kota Batam	300 Unit Usaha	803.580.340,00	PAD

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam pada Tahun 2026 khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya, serta didasarkan pada lintas program melalui mekanisme yang partisipatif, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Batam yang menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam.

Sebagai dokumen rencana resmi daerah, diharapkan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2026 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparaturnya pelaksana program/kegiatan dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas, akuntabilitas dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarnya.

5.1 Catatan Penting

Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026 dan berpedoman pada Rancangan Rencana Strategis Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 serta berfungsi sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2026, perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029.

Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2026 memuat program, kegiatan, subkegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan. Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2026 terdiri atas 3 (tiga) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 37 (tiga puluh tujuh) subkegiatan. Dokumen Renja ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.

Jika dalam proses perkembangannya pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya perubahan seperti: kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah, dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dasar Perubahan RKPD Tahun 2025, maka akan dilakukan perubahan Renja Tahun 2026.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Penyusunan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Program dan kegiatan yang direncanakan bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang tertuang dalam Rancangan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2025-2029, yang di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Beberapa kaidah-kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan Tahun 2026 yang dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan dan dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RPJMN, RKPD Provinsi, RPJPD Kota, RPJMD Kota, RKPD Kota Batam dan Renstra Perangkat Daerah).
2. Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang menjadi dasar dalam sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Program dan kegiatan pada Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2026 yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku.
2. Peningkatan pemahaman dan komitmen seluruh aparatur Pemerintah Kota Batam terhadap perencanaan dan pelaksanaan seluruh program, kegiatan dan subkegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2026 dengan efektif dan efisien;
3. Adanya peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan tugas yang semakin kompleks dengan upaya melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur baik melalui luring maupun daring;
4. Dalam menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, maka seluruh aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam secara berjenjang, bertanggung jawab dan wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2026.

Demikian Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Tahun 2026 yang telah kami susun, semoga dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dalam pelayanan perencanaan pembangunan daerah.

WALI KOTA BATAM

AMSAKAR ACHMAD

